



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP) TAHUN 2018



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH**

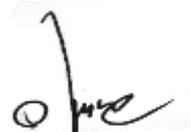
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2018 ini secara umum menggambarkan pencapaian kinerja instansi dan sekaligus merupakan bahan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, serta sebagai salah satu wujud pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dan juga sebagai implementasi dari ketentuan yang termuat dalam Inpres Nomor 7 tahun 1979 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan ini memuat beberapa aspek, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2017 a/d 2022, capaian kinerja dan beberapa kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam pemecahan permasalahan. Berbagai informasi yang dimuat disajikan secara kuantitatif maupun kualitatif, informasi ini diharapkan dapat menggambarkan kinerja unit kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh beserta sub unit kerja Sekretariat dan bidang-bidangnya sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam aspek-aspek apa saja yang masih menjadi kendala sehingga pencapaian hasil kinerja di masa mendatang dapat dioptimalkan.

Akhir kata, mudah-mudahan laporan ini bermanfaat hendaknya dan sesuai dengan harapan.

Payakumbuh, Februari 2019
**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH**



EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) ini merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan, hasil analisis capaian dari 5 (lima) indikator sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis perubahan Tahun 2017-2022, ternyata telah menunjukkan kinerja yang baik.

Pada tahun 2018, target Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh pada setiap indikator kinerja dapat direalisasikan 100%, kecuali untuk indikator Stabilitas Harga pada komoditi Bawang Merah yang tidak mencapai target dan Stabilitas Pasokan. Sementara itu, realisasi kinerja tahun 2018 pada masing-masing indikator kinerja pada umumnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017. Kecuali pada indikator stabilitas harga pada komoditi bawang merah yang mengalami penurunan sesuai dengan target yang diharapkan dari 84,15% menjadi 39,6%. Untuk Stabilitas Pasokan dari 100% menjadi 98% . Pada tahun 2018 secara total capaian kinerja : belanja langsung, belanja tidak langsung dan APBN/ DAK sebesar 98,13%.

Dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut, kinerja kegiatan-kegiatan dengan dana APBD yang dilaksanakan pada tahun 2018 (Belanja Langsung) menunjukkan kinerja yang cukup baik, yaitu pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan dimana tingkat capaian kinerja mencapai 95,57%. Sedangkan pada tahun lalu hanya tercapai sebesar 94,27%..

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	2
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018	
2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu.....	11
2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	24
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis.....	26
C. Akuntabilitas Keuangan	70
BAB IV PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

TABEL 1. Perbandingan Ketersediaan Pangan Untuk dikonsumsi Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017 dan 2018	6
TABEL 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Hasil Reviu.....	12
TABEL 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018	14
TABEL 2.3 Perjanjian Kinerja.....	16
TABEL 2.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
TABEL 2.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Hasil Reviu.....	21
TABEL 2.6 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu.....	23
TABEL 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	27
TABEL 3.2 Pencapaian Target Sasaran.....	28
TABEL 3.3 Analisis Pencapaian Sasaran 1.....	30
TABEL 3.4 Skor Pola Harapan (Skor PPH) Tingkat Ketersediaan.....	31
TABEL 3.5 Capaian Kinerja Indikator Skor PPH Ketersediaan.....	33
TABEL 3.6 Skor PPH Tahun 2012-2018	34
TABEL 3.7 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Keberagaman Ketersediaan Pangan	38
TABEL 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran 2	39
TABEL 3.9 Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Konsumsi	42
TABEL 3.10 Hasil Pemeriksaan Kandungan Formalin pada Sampel Pangan Segar.....	45
TABEL 3.11 Hasil Uji Residu Pestisida pada sampel sayuran dan buah.....	46
TABEL 3.12 Capaian Kinerja Indikator Tingkat Keamanan Pangan tahun 2012-2018.....	51
TABEL 3.13 Tingkat Efektifitas dan efisiensi kinerja meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat Yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.....	53
TABEL 3.14 Analisis Pencapaian Sasaran 3.....	54
TABEL 3.15 Gambaran gejala harga bahan pangan pokok dan koefisien variasi (CV) Tingkat Konsumen Tahun 2018.....	57
TABEL 3.16 Gambaran gejala harga cabe merah dan CV Tingkat Konsumen Tahun 2018.....	60
TABEL 3.17 Gambaran gejala harga bawang merah dan CV Tingkat Konsumen Tahun 2018.....	62
TABEL 3.18 Data Pasokan Penyediaan Pangan di Kota Payakumbuh tahun 2018	65
TABEL 3.19 Tingkat Efektifitas dan efisiensi kinerja sasaran meningkatnya kelancaran distribusi Pangan.....	67
TABEL 3.20 Analisis Pencapaian Sasaran 4	68
TABEL 3.21 Pagu dan Realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2018.....	70
TABEL 3.22 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2018.....	74

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 Perbandingan ketersediaan pangan untuk dikonsumsi Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017-2018.....	7
GAMBAR 2 Ketersediaan energy untuk dikonsumsi penduduk Kota Payakumbuh Menurut kelompok bahan pangan Tahun 2018.....	35
GAMBAR 3 Perkembangan Harga beras kualitas I di tingkat Konsumen.....	58
GAMBAR 4 Perkembangan Harga Beras kualitas II di tingkat Konsumen.....	59
GAMBAR 5 Perkembangan Harga Cabe Merah di tingkat Konsumen.....	61
GAMBAR 6 Perkembangan Harga Bawang Merah di Tingkat Konsumen.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemahaman Kepemerintahan yang baik (Good Governance) mulai mengemuka seiring setelah munculnya krisis multidimensi di negeri ini dan seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat sehingga menuntut agar pemerintah menyelenggarakan pemerintah secara baik. Untuk mewujudkan terselenggaranya good governance tersebut tentunya, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, karena untuk membangun good governance bukan semata-mata masalah memperbaiki institusi pemerintah, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi dari pelaku-pelaku dalam masyarakat. Koordinasi yang baik, integrasi, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari semua pihak sangat diperlukan guna mewujudkan terselenggaranya good governance tersebut.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Laporan Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan

Laporan Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

C. Tugas dan Fungsi

1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dibentuk dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 95 Tahun 2016 adalah :

Kepala Dinas membawahkan :

1. Sekretariat membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
2. Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahkan 2 (dua) seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan
 - b. Seksi Distribusi dan Kerawanan Pangan
3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahkan 2 (dua) seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
 - b. Seksi Keamanan dan Kelembagaan Pangan
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
5. Kelompok Jabatan Fungsional

(Untuk lebih jelasnya terlampir Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh)

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH TA 2017 (DasarPerda No. 17/2016)**



2. Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pangan, melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, memantau dan melakukan evaluasi pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan, melaksanakan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya serta melakukan tugas-tugas desentralisasi dari pemerintah pusat dibidang ketahanan pangan.

Adapun tugas pokok Kepala Dinas sebagai berikut:

Membantu Walikota dalam penyelenggaraan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan pelayanan pemerintah dibidang ketahanan pangan, melakukan tugas-tugas desentralisasi dari pemerintah pusat dibidang ketahanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pangan.
- Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan.
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

- Pelayanan teknis dan administrasi terhadap semua urusan dilingkungan ketahanan pangan dan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang ketahanan pangan.
- Koordinasi perencanaan, implementasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketahanan pangan.
- Koordinasi perumusan kebijakan ketersediaan pangan dan cadangan pangan pemerintah serta masyarakat.
- Koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pemantauan ketahanan pangan, distribusi dan harga pangan, strategi serta penganeekaragaman konsumsi pangan.

- Koordinasi perumusan kebijakan kewaspadaan pangan dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan gejala rawan pangan, keamanan pangan, peningkatan mutu pangan dan gizi.
- Pengorganisasian perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas dengan prinsip-prinsip pelayanan prima yang terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

4. Aspek-aspek Strategis Organisasi

a. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, aman, dan bergizi untuk semua orang dalam suatu daerah baik yang berasal dari produk sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini harus mampu mencukupi konsumsi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat, baik dalam saat normal maupun saat terjadinya bencana. Ketersediaan untuk konsumsi pangan Kota Payakumbuh Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.

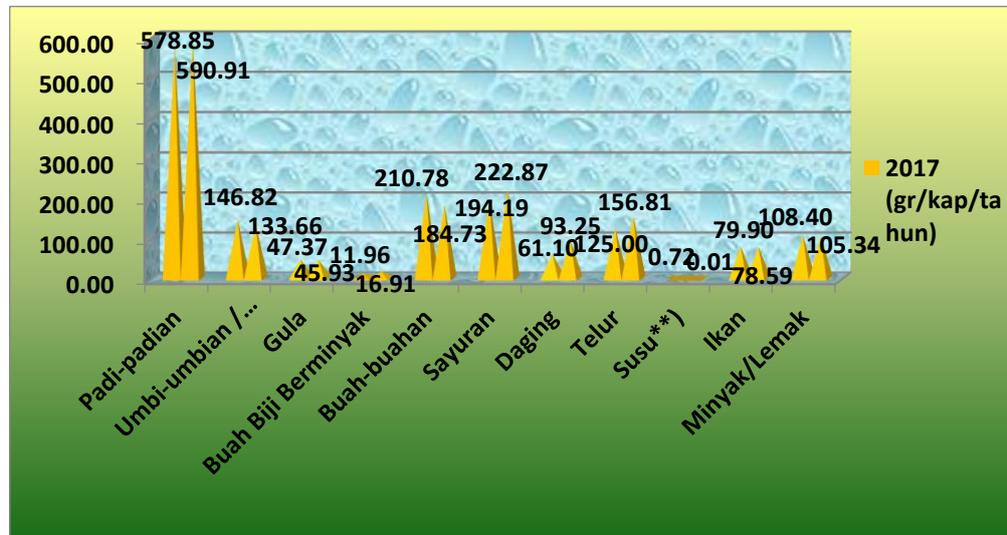
Tabel 1.
Perbandingan Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017 dan 2018

No.	Kelompok Bahan Pangan	Ketersediaan Pangan (Kg/Kap/Tahun)*		Ketersediaan Pangan (Gr/Kap/Tahun)*	
		2017	2018	2017	2018
1	Padi-padian	211.28	215.68	578.85	590.91
2	Umbi-umbian / Makanan Berpati	53.59	48.79	146.82	133.66
3	Gula	17.29	16.77	47.37	45.93
4	Buah Biji Berminyak	4.36	6.17	11.96	16.91
5	Buah-buahan	76.94	67.43	210.78	184.73
6	Sayuran	70.88	81.35	194.19	222.87
7	Daging	22.30	34.04	61.10	93.25
8	Telur	45.62	57.23	125.00	156.81
9	Susu**)	0.26	0.00	0.72	0.01
10	Ikan	29.16	28.69	79.90	78.59
11	Minyak/Lemak	39.57	38.45	108.40	105.34
	Jumlah	571,25	594.59	1,565.09	1,629.00

Sumber : Hasil olahan DKP Kota Payakumbuh

Jika di tuangkan dalam gambar, maka Ketersediaan Pangan untuk dikonsumsi Penduduk Payakumbuh Tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 1. Perbandingan Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2017 dan 2018



Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat dilihat bahwa Rata-rata ketersediaan pangan tahun 2018 adalah 594.69 kg/kap/tahun, jika dibandingkan pada tahun 2017 dengan rata-rata sebesar 571,25 kg/kap/tahun, terjadi kenaikan pada tahun 2018 sebesar 0.96%. Kenaikan ketersediaan pangan di Kota Payakumbuh dibandingkan tahun sebelumnya tidak terjadi terlalu besar. Penurunan terjadi pada kelompok bahan pangan kelompok umbi-umbian/makanan berpati, hal ini disebabkan karena produksi ubi kayu menurun dari 53,59 kg/kap/tahun pada tahun 2017 menjadi 16,77 kg/kap/tahun pada tahun 2018, yang berdampak juga pada ketersediaan pada kelompok umbi-umbian/makanan berpati pada tahun 2018. Selain itu, peningkatan ketersediaan juga terjadi pada, kelompok Daging meningkat sebesar 52,61%, kelompok telur meningkat sebesar 25,44% dan pada kelompok meningkat sayuran sebesar 14,77%

Dinas Ketahanan Pangan memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pemantapan ketersediaan pangan, yaitu berperan pada : a) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan; b) Penyempurnaan sistem pemantauan produksi dan ketersediaan pangan untuk mengantisipasi rawan pangan; c) Mengembangkan

program kemandirian pangan pada desa rawan pangan; dan d) Pengembangan akses pangan rumah tangga.

Dalam upaya peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, belum seluruh potensi sumberdaya alam yang terdapat di Kota Payakumbuh dikelola secara optimal. Terkait dengan penyediaan pangan dan perwujudan ketahanan pangan, pengelolaan lahan dan air merupakan sumber daya alam utama yang perlu dioptimalkan untuk menghasilkan pangan. Potensi sumber daya alam yang beragam dan dukungan ketersediaan teknologi di bidang hulu sampai hilir akan memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, serta meningkatkan usaha agribisnis pangan.

b. Distribusi dan Harga Pangan

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien, sebagai persyaratan untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar musim menurut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi pangan, sehingga pangan tersedia sepanjang waktu di seluruh wilayah. Kinerja subsistem distribusi dipengaruhi oleh kondisi prasarana dan sarana kelembagaan dan peraturan perundang-undangan.

Kelembagaan pemasaran bahan pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan, hal ini berpotensi menyebabkan penurunan harga secara signifikan di sentra produksi pada saat panen dan sebaliknya meningkatkan harga secara tajam pada musim paceklik. Selain itu, masih terdapat kelembagaan pemasaran yang dikuasai oleh kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan sistem yang adil diantara pelakunya.

Selanjutnya alur distribusi pangan dari produsen sampai ke konsumen terlihat melalui beberapa tingkatan pelaku distribusi. Pada setiap tingkatan pelaku distribusi tersebut memberikan margin keuntungan, sehingga semakin banyak tingkatan pelaku distribusi tersebut akan berdampak terhadap biaya yang dikeluarkan. Beban tersebut akan diteruskan kepada konsumen yang berakibat terhadap tingginya harga pangan.

Selain itu, distribusi pangan antar wilayah belum dapat dilihat secara cermat dan akurat pada saat ini. Diperlukan pemantauan arus masuk dan keluar pangan melalui pos-pos penjagaan TPR oleh Dinas Perhubungan dan pendirian pos-pos pangan di daerah perbatasan dengan kabupaten tetangga.

Sebagaimana dijelaskan diatas, arus distribusi pangan akan berdampak terhadap harga bahan pangan dan akan menentukan keterjangkauan rumah tangga terhadap bahan pangan. Perubahan dan fluktuasi harga pangan dapat terjadi sewaktu-waktu karena berbagai faktor seperti terjadinya panen raya, hari besar agama, gagal panen, terganggunya arus distribusi dan sebagainya.

Selanjutnya informasi harga pangan sangat diperlukan oleh produsen yaitu untuk melihat kapan memproduksi bahan pangan tersebut melalui pengaturan pola tanam, melihat peluang pasar yang ada, dan memperhatikan gejolak harga yang terjadi. Sedangkan bagi pemerintah diperlukan untuk mengambil kebijakan antisipasi terjadinya gejolak harga pada saat-saat tertentu dengan melakukan operasi pasar. Dengan demikian, diperlukan penataan jaringan informasi harga pangan, sehingga informasi harga sampai ke produsen dan pemerintah tepat waktu. Pada saat ini, informasi harga tersebut sampai ke produsen baru melalui pedagang-pedagang pengumpul/ pedagang besar, sehingga harga sudah terlebih dahulu naik di tingkat konsumen baru diikuti di tingkat produsen.

Dinas Ketahanan Pangan memiliki potensi dan peluang dalam merumuskan kebijakan distribusi pangan, antara lain berperan pada : a) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan untuk mendukung distribusi pangan yang mudah dan murah; b) Penyempurnaan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan sistem distribusi pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis akses harga pangan masyarakat; c) Distribusi pangan masyarakat; dan d) Pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat dan pengembangan lembaga pemerintah daerah.

c. Konsumsi dan Keamanan Pangan

Ditinjau dari tingkat konsumsi energi, rata-rata konsumsi energi masyarakat Kota Payakumbuh sebesar 4.283,55 kkal/kap/hari atau 194,7% dari angka standar kecukupan konsumsi energi yang dianjurkan yaitu sebesar 2.200 kkal/kap/hari. Ditinjau dari komposisi gizi, konsumsi masyarakat Kota Payakumbuh

belum berimbang, dimana penduduk Kota Payakumbuh masih didominasi oleh bahan pangan nabati.

Untuk protein hewani yang berasal dari ternak, masyarakat mengkonsumsi telur sebesar 46,55 kg/kap/tahun dan konsumsi daging sebesar 19,78 kg/kap/tahun. Sedangkan konsumsi susu masih jauh dari Pola Pangan Harapan, yaitu hanya sebesar 0,08 kg/kap/tahun. Hal ini disebabkan karena rendahnya daya beli masyarakat terhadap konsumsi pangan daging dan susu yang menurut ukuran mereka sangat mahal.

Disamping ketersediaan dan konsumsi pangan, akses pangan juga sangat mempengaruhi karena untuk mengakses pangan sangat tergantung pada kemampuan rumah tangga dalam mencukupi kebutuhannya. Semakin rendah daya akses masyarakat terhadap pangan, maka semakin tinggi derajat kerawanan pangan pada wilayahnya.

Dinas Ketahanan Pangan memiliki mempunyai tugas dan fungsi mendorong percepatan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yaitu berperan pada : a) Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan, b) Penyempurnaan program dan kegiatan dalam rangka pengembangan konsumsi dan keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan, dan c) Pembinaan untuk pengembangan kelembagaan pedesaan dalam diversifikasi konsumsi pangan dan keamanan pangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018

2.1. Perencanaan Strategis

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan, sebagai berikut :

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 32 Tahun 2018 Tahun tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Dalam RPJMD Kota Payakumbuh telah ditetapkan Visi Kota Payakumbuh lima tahun kedepan yaitu ***Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat, Dengan Semangat Kebersamaan, Menuju Payakumbuh Menang***". Dalam visi tersebut terdapat 5 (lima) misi yaitu (1) Mewujudkan sumber daya manusia yang handal, sehat, dan kompotitif, (2) Membangun perekonomian yang tangguh, unggul, berdaya saing dan berkeadilan dengan berbasis ekonomi kerakyatan, (3) Meningkatkan penataan Kota, ketersediaan infrasuktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan, **(4)** Menghadirkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, (5)Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya, berdasarkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah, maka Dinas Ketahanan Pangan juga mempunyai Visi Tahun 2017-2022 yaitu :

Terwujudnya ketahanan pangan Kota Payakumbuh yang mantap menuju masyarakat yang sehat, maju, sejahtera dan mandiri

Sedangkan untuk mewujudkan visi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

"Mewujudkan ketersediaan pangan, penganekaragaman, keamanan dan keterjangkauan pangan masyarakat"

- **Tujuan, Sasaran dan Indikator**

Selanjutnya Tujuan, Sasaran dan Indikator yang diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran (IKU/SPM)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-						Ket
				2017	1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh		Indeks Ketahanan Pangan	sedang	sedang	Tinggi	tinggi	Tinggi	Tinggi	
1.		Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan	1.Skor PPH Ketersediaan	80	83	86	90	94	96,5	IKU
2.		Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman	2.Skor PPH Konsumsi	NA	80,5	82	86	90,5	93	IKU
			3.Tingkat Keamanan Pangan (%)	Sedang	sedang	Sedang	tinggi	Tinggi	Tinggi	IKU
3.		Meningkatnya kelancaran distribusi pangan	4. Stabilitas Harga (%)							
			Beras	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	IKU
			Cabe	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	≤25	IKU
			Bawang	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	IKU
			5. Stabilitas Pasokan (%)	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	≥ 77	IKU
4.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektorat	B	BB	BB	A	A	A	IKU

- **Program dan Kegiatan**

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh pada tahun 2017-2022 sesuai dengan visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan permasalahan dan potensi ketahanan pangan; adalah **Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan.**

Sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai dalam program tersebut adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel 2.5 berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Ket/Kriteria
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	
1.	Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan	Skor PPH Ketersediaan	%	Memenuhi SPM Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian	Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan	Neraca Bahan Makanan (NBM)	
2.	Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman	Skor PPH Konsumsi	%	Memenuhi SPM Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang	Neraca Bahan Makanan (NBM)	
		Tingkat Keamanan Pangan	%	Memenuhi SPM Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian	Kualitas keamanan pangan Kota Payakumbuh yang digambarkan dari jumlah pangan segar yang aman dikonsumsi, dengan tingkatan : rendah : 0% - 60% cukup : > 60% - 70% sedang : > 70% - 80% tinggi : > 80% - 100%	Hasil Uji Sampel	

3.	Meningkatnya kelancaran distribusi pangan	Stabilitas Harga				
		- beras	%	Memenuhi SPM Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian	Harga beras dinyatakan stabil jika gejolak harga beras di suatu wilayah kurang dari 10% dari kondisi normal	Data Panel Harga
		- cabe	%	Memenuhi SPM Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian	Harga cabe dinyatakan stabil jika gejolak harga cabe di suatu wilayah kurang dari 25% dari kondisi normal	Data Panel Harga
		- bawang	%	Memenuhi SPM Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian	Harga bawang dinyatakan stabil jika gejolak harga bawang di suatu wilayah kurang dari 10% dari kondisi normal	Data Panel Harga
		Stabilitas Pasokan	%	Memenuhi SPM Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian	Pasokan pangan dinyatakan stabil jika tersedia pasokan sebanyak 77 %	Data Stok
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektorat	Nilai	Berdasarkan evaluasi dari Inspektorat berdasarkan dokumen perencanaan yang ada		

C. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Walikota dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

**Perjanjian Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan	1 Skor PPH Ketersediaan	83
2.	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman	2 Skor PPH Konsumsi	80,5
		3 Tingkat Keamanan Pangan	Sedang
3.	Meningkatnya kelancaran distribusi pangan	4 Stabilitas Harga - Beras - Cabe - Bawang	≤10% ≤25% ≤10%
		5 Stabilitas Pasokan	≥77%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan	6 Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan	BB

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja

utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
Tahun 2018**

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>90	Biru
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Kuning
4	Kurang	50.00 – 64.99	Merah
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Nomor : 520.64/SK/DKP-PYK/2018, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategis

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 81 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Payakumbuh

Tahun 2017-2022. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 4 (empat) sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 5 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Skor PPH Ketersediaan	Nilai	83	84,31	101,58
2	Skor PPH Konsumsi	Nilai	80,5	84,1	104,47
3	Tingkat Keamanan pangan	level	sedang	Sedang	100,00
4	Stabilitas Harga				
	a. Beras	%	10	1,75	182,5
	b. Cabe	%	25	13,99	144,04
	c. Bawang	%	10	16,04	39,6
5	Stabilitas Pasokan	%	77	78,25	98,37
6	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	BB	A	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Skor PPH Ketersediaan dengan capaian kinerja 101,57 %, Skor PPH Konsumsi dengan capaian 104,47%, Stabilitas Harga Beras 182,5%, Stabilitas Harga Cabe 144,04%, Stabilitas Harga Bawang 39,6% dan Stabilitas Pasokan sebesar 98,37%

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Tingkat Keamanan Pangan, dengan capaian kinerja 100%.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Stabilitas Harga Bawang dengan capaian kinerja 58,00 %.

Adapun pencapaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran diatas, dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Target Sasaran

No.	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam	1	1	101,57				
2	Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman	2	1	102,47				

3.	Meningkatnya kelancaran distribusi pangan	2		121,25			1	58%
----	---	---	--	--------	--	--	---	-----

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 5 indikator kinerja dari Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2017		%	Capaian Tahun 2018		%	Kategori	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2018 terhadap akhir renstra (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi				
1	Skor PPH Ketersediaan	%	80	81,5	101,8	83	84,31	101,58	Sangat baik	96,5	87,37

Sumber : DKP, 2018

Sasaran meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan dilihat dari indikator : Skor PPH Ketersediaan.

Capaian kinerja nyata indikator Skor PPH Ketersediaan adalah sebesar 84,31 dari target sebesar 83 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,58 % dengan kategori sangat baik. Capaian ini hampir sama dari capaian tahun sebelumnya hanya saja sedikit turun 0,23 Point.

Sasaran meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan dengan indikatornya ini menjadi sangat penting karena tertuang dalam SPM dan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan SPM Ketahanan Pangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun





2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ Tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah.

Indikator keberagaman ketersediaan pangan yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Penyusunan PPH dibuat berdasarkan pertimbangan ukuran pola konsumsi yang dibuat oleh FAO. Susunan PPH memuat 9 (sembilan) kelompok pangan mulai dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayuran dan buah, biji-bijian dan lemak berminyak, gula serta kelompok lain-lainnya.

Hasil penghitungan PPH tahun 2018 yang didasarkan pada basis analisis data ketersediaan pangan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4
SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) TINGKAT KETERSEDIAAN
TAHUN 2018

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1.	Padi-padian	2.103,66	87,65	0,5	43,83	25,0	25,0	
2.	Umbi-umbian	138,57	5,77	0,5	2,89	2,5	2,5	
3.	Pangan Hewani	398,55	16,61	2,0	33,21	24,0	24,0	
4.	Minyak dan Lemak	961,75	40,07	0,5	20,04	5,0	5,0	

5.	Buah/biji berminyak	7,84	0,33	0,5	0,16	0,16	1,0	
6.	Kacang-kacangan	53,46	2,23	2,0	4,46	4,46	10,0	
7.	Gula	168,22	7,01	0,5	3,50	2,50	2,5	
8.	Sayuran dan buah	99,32	4,14	5,0	20,69	20,69	30,0	
9.	Lain-lain		-	-	-	-	-	
	Jumlah	3.931,36	163,8		128,8	84,31	100,0	

Keterangan : * Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2.200 kkal/kap/hari

Skor Pola Pangan Harapan Kota Payakumbuh ditingkat Ketersediaan pada tahun 2018 adalah sebesar 84,31 artinya bahwa ketersediaan energi di Kota Payakumbuh pada tahun 2018 belum memenuhi kebutuhan gizi seimbang dan beragam. Ini dapat terlihat bahwa kelompok padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, serta gula skornya sudah di atas skor maksimal, sedang untuk buah/biji berminyak, kacang-kacangan serta sayuran dan buah, skornya belum mencukupi kebutuhan dimana skor Pola Pangan Harapan Ketersediaannya belum mencapai skor maksimal atau belum ideal.

Untuk itu perlu dilakukan peningkatan ketersediaan pada kelompok pangan kacang-kacangan, buah/biji berminyak serta buah dan sayuran agar skor Pola Pangan Harapan yang ideal dapat dipenuhi. Apabila ketersediaan akan kelompok pangan tersebut cukup atau bahkan melebihi anjuran yang ada, maka akan berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat, hal ini akan memudahkan kita untuk menyarankan agar masyarakat mengkonsumsi seluruh kelompok bahan pangan tersebut sesuai dengan komposisi yang sesuai sehingga akan tercipta pola konsumsi yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

Pola konsumsi yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) secara otomatis akan mampu meningkatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH), karena adanya keseimbangan gizi dari setiap kelompok bahan pangan yang dikonsumsi.

Skor Pola Pangan Harapan bisa dijadikan sebagai dasar untuk perencanaan produksi dan penyediaan pangan jangka pendek atau jangka panjang dengan mempertimbangkan manajemen, sumber daya dan keberadaan intervensi pendidikan gizi. Secara umum, ketersediaan energi pada tahun 2015 di Kota Payakumbuh telah sesuai dengan harapan bahkan sudah melampaui dimana besaran ketersediaan energinya mencapai 5.806,80 kkal/kap/hari. Kelompok bahan

pangan padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, serta gula penyediaannya sudah melebihi dari yang diharapkan atau sudah mencapai batas maksimal pencapaian ketersediaan energy dari bahan pangan tersebut. Sementara itu pada kelompok buah/biji berminyak, kelompok kacang-kacangan serta sayur dan buah masih perlu ditingkatkan lagi di Kota Payakumbuh pada tahun mendatang dalam jangka pendek atau jangka panjang minimal sebesar selisih atau kekurangan dari ketersediaan yang ideal.

Jika diperhatikan perkembangan capaian Skor PPH Ketersediaan ini dari tahun ke tahun dapat dijelaskan bahwa Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pada tahun 2012 tercapai 71,55 dari target 74 atau terealisasi sebesar 96,68%. Dan untuk tahun 2013 dari target 75 terealisasi sebesar 74,48 atau 99,3%. Tahun 2014 tercapai 77 dari target 76 atau 100% dan tahun 2015 tercapai 79,13 dari target 77 atau 102,8% berikut makin meningkat di tahun 2016 tercapai 78,84 dari target 78 atau 101,1%. Untuk lebih jelasnya Capaian Kinerja Sasaran 1 dari Tahun 2012-2018, dapat kita lihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Indikator Skor PPH Ketersediaan
Tahun 2012-2018

No.	Indikator	Realisasi						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Skor PPH Ketersediaan	71,55	74,48	77	79,13	78,84	81,5	84,31

Sumber : DKP, 2018

Dalam tujuh tahun terakhir, indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan terus meningkat dan selalu mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dinilai baik dengan dapat tercapainya target kinerja yang telah direncanakan. Dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2012-2017 yaitu tahun 2017, capaian kinerja pada tahun 2017 sudah mencapai 101,8%. Yaitu dari target 80 sudah tercapai sebanyak 81,5. Capaian ini sudah dinilai sangat baik karena sudah melebihi 100% dan

diharapkan pada akhir tahun renstra 2017 capaian dapat melebihi target. Perbandingan nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari tahun 2012– 2017 dapat dilihat pada tabel 3.6.

TABEL 3.6
SKOR POLA PANGAN HARAPAN TAHUN 2012-2017

No	Kelompok pangan	Skor Maks	Skor PPH						
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Padi-padian	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,0	25,00
2	Umbi-umbian	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,5	2,50
3	Pangan Hewani	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,0	24,00
4	Minyak dan Lemak	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,0	5,00
5	Buah/Biji Berminyak	1,00	0,5	0,5	0,55	0,38	0,38	0,1	0,16
6	Kacang-kacangan	10,00	3,3	3,7	3,5	3,35	3,90	3,9	4,46
7	Gula	2,50	2,5	2,5	2,5	2,50	2,50	2,5	2,50
8	Sayur dan Buah	30,00	8,75	11,2	14,0	16,23	15,55	18,5	20,69
9	Lain-lain	0,00		-		-	-	-	-
Total		100,00	71,55	74,48	77,00	79,13	78,84	81,51	84,31

Sumber : Data diolah DKP, 2017



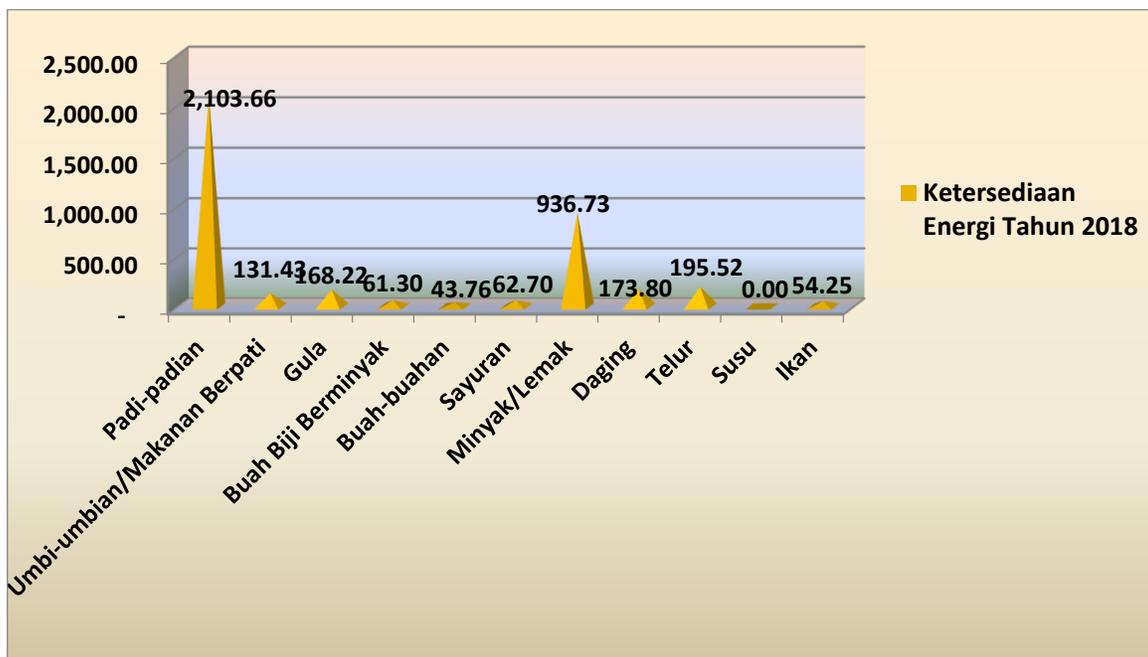
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 ketersediaan pangan di Kota Payakumbuh sudah cukup beragam. Hal ini dapat dilihat dari jenis pangan yang sudah mencapai skor maksimum, diantaranya padi-padian (25,00), umbi-umbian (2,50), pangan hewani (24,00), serta minyak dan lemak

(5,00). Sedangkan kelompok pangan yang belum mencapai skor maksimum selama tiga tahun

terakhir adalah buah/biji berminyak, kacang-kacangan, sayur dan buah dan gula. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan keempat kelompok pangan tersebut walaupun belum maksimal namun dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Payakumbuh.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan, indikator ketersediaan energi dan ketersediaan protein untuk kab/kota di Indonesia haruslah memenuhi syarat minimal 90% dari angka kecukupan energi (AKE) 2.200 kkal/kapita/hari dan angka kecukupan protein (AKP) 57 gram/kapita/hari. Kota Payakumbuh telah memenuhi standar untuk kedua indikator tersebut. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa ketersediaan energi di Kota Payakumbuh untuk tahun 2018 sebesar 3.931, 36 kkal/kapita/hari. Seperti yang terlihat pada Grafik dibawah ini.

Gambar 2. Ketersediaan Energi untuk dikonsumsi Penduduk Payakumbuh Menurut Kelompok Bahan Pangan Tahun 2018



Rata-rata ketersediaan energi menurut kelompok pangan dan ketersediaan protein menurut kelompok pangan akan memberikan kontribusi dalam menentukan skor PPH. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya skor PPH, yaitu :

1. Ketersediaan dana lintas sektoral untuk mendukung ketahanan pangan
2. Perilaku masyarakat/gaya hidup masyarakat yang berdampak pada pola serta perilaku makannya
3. Daya beli masyarakat.

Sasaran pertama ***Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan*** masuk dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dengan tiga kegiatan yaitu, Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah, dan Kegiatan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan. Output kegiatan yaitu terlaksananya pelatihan, penyediaan beras cadangan pemerintah, dan penyusunan buku Neraca Bahan Makanan.

Pada sasaran 1 ini termasuk kedalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.678.320,- dan realisasi sebesar Rp. 81.535.524,- atau 96,29 %. Serapan anggaran sebesar 96,29 % cukup tinggi yang berarti kinerja Dinas pada program ini dinilai baik.

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran ***Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan*** disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Sosialisasi *one day no rice* yang berjalan dengan baik.
2. Koordinasi lintas sektor yang semakin baik.

Faktor Penghambat :

Masih kurang nya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi daging dan ikan sebagai sumber protein dan pola kebiasaan makan masyarakat yang harus selalu mengkonsumsi nasi (beras) sebagai sumber karbohidrat utama.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran ***Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan***, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.7

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Keberagaman Ketersediaan Pangan

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan	1.1	Skor PPH Ketersediaan	Nilai	83	84,31	101,57	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	84.678.320	81.535.524	96,29
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					101,88	TOTAL PER SASARAN		84.678.320	81.535.524	96,29
TINGKAT EFISIENSI 4,77 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 104,89 %												

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran **Meningkatkan keberagaman ketersediaan pangan** berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Melakukan efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran sepanjang memungkinkan.
2. Melakukan percepatan realisasi kegiatan.

Sasaran 2
Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2017		%	Capaian Tahun 2018		%	Kategori	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2018 terhadap akhir renstra (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi				
1	Skor PPH Konsumsi	%	NA	NA	NA	80,5	84,1	104,47	Sangat baik	93	90,43
2	Tingkat Keamanan Pangan	Level	sedang	sedang	100	sedang	sedang	100	Sangat baik	tinggi	75

Sumber : DKP, 2018

Sasaran meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu Skor PPH Konsumsi dan Tingkat Kemanan Pangan. Sasaran terjaganya ketersediaan pangan dengan 2 indikatornya ini juga tertuang dalam SPM dan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan SPM Ketahanan Pangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan.

B. Indikator Pertama yaitu Skor PPH Konsumsi

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan (RPJMN) 201-2019 ada empat (4) strategi utama :

1. Peningkatan ketersediaan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri.
2. Peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.
3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
4. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan

Salah satu dari empat (4) arah kebijakan pangan yaitu perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat telah menjadi indikator yang cukup strategis dan merupakan indikator kinerja dibidang ketahanan pangan yaitu pencapaian skor PPH Konsumsi. Pentingnya pencapaian skor PPH Konsumsi tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang Ketahanan Pangan



dan Gizi. Dalam pasal 60 UU No 18 Tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai konsumsi pola pangan dan gizi seimbang,

dengan indikator yang saat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

Menurut FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH Konsumsi sebagai komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari Skor Pangan (dietary score) dan dikenalnya sebagai skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin berimbang dan seimbang.

Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan mampu memenuhi kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman pangan tersebut mencakup kelompok : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula sayur dan buah. Skor PPH di nilai dengan angka 100. Kegunaan PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Apabila terjadi ketergantungan pada jenis pangan tertentu, maka akan mengakibatkan konsumsi total meningkat dan menuntut produksi total yang tinggi pula. Oleh karena itu, jika terjadi sedikit saja gangguan pada ketersediaan pangan tersebut akan berakibat besar pada sistem ketahanan pangan nasional.

Untuk penghitungan data PPH Konsumsi Tahun 2018 berdasarkan data sekunder berasal dari data hasil survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu jenis data sekunder yang digunakan untuk analisis konsumsi pangan. Survey tersebut dilakukan oleh BPS setiap tahunnya yang terdiri dari data Nasional, Provinsi dan Kota. Data yang dikumpulkan merupakan data konsumsi/pengeluaran Rumah Tangga mencakup data makanan dan bahan makanann untuk konsumsi/pengeluaran makanan dikumpulkan data kuantitas dan nilainya sesuai dengan rincian komoditas yang terdapat pada kuisioner Susenas. Dalam analisis konsumsi pangan, khususnya menggerakan data survey konsumsi pangan, diperlukan data/instrument pendukung antara lain Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) , Daftar Ukuran Rumah Tangga (URT), Daftar Pangan Acuan, Daftar Konversi Perubahan Bentuk, Daftar Konversi Kode Kelompok Pangan, Daftar Konversi Penyerapan minyak.

Setelah dilakukan penghitungan PPH Konsumsi dengan Angka Kecukupan Energi 2.150 kkal/kapita/hari dan Angka Kecukupan Protein 57 gr/kapita/hr didapat nilai PPH Konsumsi Kota Payakumbuh Tahun 2018 sebesar 84,1.

Indikator Skor PPH Konsumsi dijadikan sebagai indikator dalam sasaran ***Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman*** baru dilakukan pada Tahun 2018. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran untuk penghitungan Skor PPH Konsumsi. Capaian kinerja nyata indikator Skor PPH Konsumsi untuk tahun 2017 masih Not Available (NA) karena indikator ini belum pernah dilakukan penghitungannya, sehingga mulai tahun 2018 dilakukanlah penghitungan Skor PPH Konsumsi. Dari perhitungan yang dilakukan diperolehlah angka 84,1.

Hasil penghitungan PPH tahun 2018 yang didasarkan pada basis data survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kota Payakumbuh Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.9
SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KONSUMSI
TAHUN 2018

Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kkal/Kapita	%	%AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
Padi-padian	302,4	1.216,2	57,5	56,6	0,5	28,8	28,3	25,0	25,0
Umbi-umbian	43,6	41,1	1,9	1,9	0,5	1,0	1,0	2,5	1,0
Pangan Hewani	130,4	249,9	11,8	11,6	2,0	23,6	23,2	24,0	23,2
Minyak dan Lemak	32,8	294,7	13,9	13,7	0,5	7,0	6,9	5,0	5,0
Buah/biji berminyak	10,9	58,3	2,8	2,7	0,5	1,4	1,4	1,0	1,0
Kacang-kacangan	19,5	46,0	2,2	2,1	2,0	4,4	4,3	10,0	4,3
Gula	21,8	79,5	3,8	3,7	0,5	1,9	1,8	2,5	1,8
Sayuran dan buah	240,1	97,8	4,6	4,5	5,0	23,1	22,7	30,0	22,7
Lain-lain	110,1	31,2	1,5	1,4	-	-	-	-	-
Jumlah		2.114,6	100,0	96,8		91,1	89,6	100,0	84,1

Keterangan : * Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2.150 kkal/kap/hari

Kualitas Konsumsi pangan masih sedang (Skor PPH 84,1) disebabkan oleh :

- Konsumsi pangan sumber karbohidrat (beras dan terigu) melebihi anjuran
- Konsumsi pangan hewani masih kurang
- Konsumsi umbi-umbia masih kurang
- Konsumsi kacang-kacangan masih kurang
- Konsumsi sayuran dan buah masih kurang
- Disamping itu disebabkan juga oleh rendahnya daya beli masyarakat

Solusinya adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia disekitar rumah untuk meningkatkan kecukupan pangan dan gizi keluarga yaitu melalui pemanfaatan pekarangan yang dikelola dan dikembangkan keluarga. Dengan memanfaatkan pekarangan secara intensif diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumsi pangan ditingkat rumah tangga dan menambah pendapatan keluarga apabila produksinya berlebih yang paling penting dapat meningkatkan Skor PPH Konsumsi.

C. Indikator kedua adalah Tingkat Keamanan Pangan



Makanan merupakan sumber energi dan sebagai zat gizi untuk mendukung hidup manusia. tetapi makanan juga dapat menjadi wahana bagi unsur pengganggu kesehatan manusia. secara umum bahaya yang timbul dari makanan/minuman sering disebut keracunan makanan. Timbulnya bahaya dapat terjadi melalui unsur mikroorganisme, kimia atau alami.

Salah satu sasaran pengembangan di bidang pangan adalah terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan. Dalam upaya mewujudkan sistem jaminan mutu di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan standarisasi melalui Peraturan Pemerintah No. 102 tahun 2000 tentang “standarisasi Nasional” yang selanjutnya PP dimaksud dijabarkan di sektor pertanian melalui keputusan-keputusan Menteri Pertanian No. 170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di sektor pertanian. Dalam keputusan ini juga memuat tentang kebijakan sistem jaminan mutu di sektor pertanian.

Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang akan dikonsumsi masyarakat di Kota Payakumbuh supaya masyarakat terhindar dari bahaya yang diakibatkan oleh bahan-bahan berbahaya, seperti residu pestisida, bakteri, dan formalin. Maka perlu dilaksanakan pengawasan terhadap pangan segar yang beredar di Kota Payakumbuh. Adapun pengawasan dan pengambilan sampel bahan pangan telah dilaksanakan sebanyak 4 kali sebanyak 57 sampel yang terdiri dari residu pestisida 35 komoditi, formalin 22 jenis

- a. Pemeriksaan kandungan formalin pada pangan segar ke Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BLPPMHP), hasilnya sebagai berikut :

Tabel. 3.10**Hasil Pemeriksaan Kandungan Formalin
pada Sampel Pangan Segar**

No	Sampel	Formalin	Kadar Formalin (ppm)
1.	Mi Putih A	Negatif	
2.	Mi Kuning	Negatif	
3.	Mi Putih B	Negatif	
4.	Tahu A	Negatif	
5.	Tahu B	Negatif	
6.	Tahu C	Negatif	
7.	Tahu D	Negatif	
8.	Udang Ebi	Negatif	
9.	Baguak Kering	positif	7,86
10.	Gambolo Kering	positif	4,90
11.	Todak Kering	Negatif	
12.	Bada Putih Kering	Negatif	
13.	Sapek	Negatif	
14.	Terin Kering	Negatif	
15.	Tarubuak Kering	Negatif	
16.	Kaliang-kaliang kering	positif	4,90
17.	Tamban Kering	Negatif	
18.	Tuna Segar	Negatif	
19.	Pinang-pinang segar	Negatif	
20.	Tongkol segar	positif	4,90
21.	Jumbo segar	Negatif	
22.	Sarai segar	Negatif	

Dari hasil pemeriksaan 22 sampel ini, 4 diantaranya positif mengandung formalin. Untuk tindak lanjutnya hasil pemeriksaan ini dilaporkan ke Tim Terpadu pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh untuk pembinaan.

- b. Pemeriksaan residu pestisida pada pangan segar ke Laboratorium Pestisida Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang dengan jumlah sampel sebanyak 35 komoditi pangan. Hasil pemeriksaan terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11

Hasil Uji Residu Pestisida pada Sampel Sayuran dan Buah

No	Komoditi	Yang diperiksa	Hasil (mg/kg)	Batas Penetapan (mg/kg)	BMR (mg/kg)
1.	Semangka	Sipermetrin	Tidak terdeteksi	0,027	-
		Klorfirifos	Tidak terdeteksi	0,059	-
		Dimetoat	Tidak terdeteksi	0,024	-
2.	Jeruk Mudik	Metomil	Tidak terdeteksi	0,050	1,000
		Klorfirifos	Tidak terdeteksi	0,059	1,000
		Dimetoat	Tidak terdeteksi	0,024	5,000
3.	Lengkeng	Sipermetrin	Tidak terdeteksi	0,027	-
		Klorfirifos	Tidak terdeteksi	0,059	-
		Dimetoat	Tidak terdeteksi	0,024	-
4.	Jambu biji	Sipermetrin	Tidak terdeteksi	0,027	-
		Metomil	Tidak terdeteksi	0,050	-
		Metidation	Tidak terdeteksi	0,035	-
5	Buah Naga Utuh	Sipermetrin	Tidak terdeteksi	0,027	-
		Metomil	Tidak terdeteksi	0,050	-
		Metidation	Tidak terdeteksi	0,035	-
6	Cabe Merah Kampung	Sipermetrin	Tidak terdeteksi	0,027	10,000
		Klorfirifos	Tidak terdeteksi	0,059	20,000
		Profenofos	1,027	0,005	20,000
7	Cabe Merah Kotak	Sipermetrin	Tidak terdeteksi	0,027	10,000
		Dimetoat	Tidak terdeteksi	0,024	3,000
		Profenofos	Tidak terdeteksi	0,005	20,000
8	Cabe Merah Kopay	Sipermetrin	Tidak terdeteksi	0,027	10,000
		Dimetoat	Tidak terdeteksi	0,024	3,000
		Profenofos	3,340	0,005	20,000

No	Komoditi	Yang diperiksa	Hasil	Batas Penetapan	BMR
9	Cabe Hijau Kopay	Sipermetrin	Tidak terditeksi	0,027	10,000
		Klorfirifos	Tidak terditeksi	0,059	20,000
		Profenofos	Tidak terditeksi	0,005	20,000
10	Bawang merah	Sipermetrin	Tidak terditeksi	0,027	0,010
		Metomil	Tidak terditeksi	0,050	0,200
		Klorfirifos	0,198	0,059	0,200
11	Tomat	Sipermetrin	Tidak terditeksi	0,027	0,200
		Klorfirifos	Tidak terditeksi	0,059	1,000
		Profenofos	Tidak terditeksi	0,005	10,000
12	Timun	Diazinon	Tidak terditeksi	0,020	0,100
		Metidation	Tidak terditeksi	0,035	0,050
		Permetrin	Tidak terditeksi	0,023	0,500
13	Kol	Diazinon	Tidak terditeksi	0,020	0,500
		Permetrin	Tidak terditeksi	0,023	5,000
		Klorfirifos	Tidak terditeksi	0,059	1,000
14	Terung	Sipermetrin	Tidak terditeksi	0,027	0,030
		Permetrin	Tidak terditeksi	0,023	1,000
		Klorfirifos	Tidak terditeksi	0,059	1,000
15	Brokoli	Diazinon	Tidak terditeksi	0,020	0,500
		Permetrin	Tidak terditeksi	0,023	2,000
		Klorfirifos	Tidak terditeksi	0,059	2,000
16	Oyong	Sipermetrin	Tidak terditeksi	0,027	-
		Metidation	Tidak terditeksi	0,035	-
		Metomil	Tidak terditeksi	0,050	-
17	Kangkung	Sipermetrin	Tidak terditeksi	0,027	-
		Dimetoat	Tidak terditeksi	0,024	-
		Metomil	Tidak terditeksi	0,050	-

No	Komoditi	Yang diperiksa	Hasil	Batas Penetapan	BMR
18	Bayam	Diazinon	Tidak terditeksi	0,020	0,500
		Dimetoat	Tidak terditeksi	0,024	-
		Permetrin	Tidak terditeksi	0,023	2,000
19	Jambu biji	Dimetoat	Tidak terditeksi	0,024	-
		Metomil	Tidak terditeksi	0,050	-
		Metidation	Tidak terditeksi	0,035	-
20	Pir	Dimetoat	Tidak terditeksi	0,024	1,000
		Metomil	Tidak terditeksi	0,050	0,300
		Metidation	Tidak terditeksi	0,035	1,000
21	Apel	Deltametrin	Tidak terditeksi	0,033	0,200
		Metomil	Tidak terditeksi	0,050	0,300
		Metidation	Tidak terditeksi	0,035	0,500
22	Jeruk	Dimetoat	Tidak terditeksi	0,024	5,000
		Klorfirifos	Tidak terditeksi	0,059	1,000
		Metidation	Tidak terditeksi	0,035	2,000
23	Mangga	Dimetoat	Tidak terditeksi	0,024	1,000
		Sipermetrin	Tidak terditeksi	0,027	0,700
		Profenofos	Tidak terditeksi	0,005	0,200
24	Cabe Merah Kopay	Dimetoat	Tidak terditeksi	0,024	3,000
		Diazinon	Tidak terditeksi	0,020	0,500
		Profenofos	3,009	0,005	3,000
25	Cabe Hijau Kopay	Klorfirifos	Tidak terditeksi	0,059	10,000
		Diazinon	Tidak terditeksi	0,020	0,500
		Profenofos	Tidak terditeksi	0,005	3,000
26	Bawang Merah	Metidation	Tidak terditeksi	0,035	0,100
		Diazinon	Tidak terditeksi	0,020	0,050
		Metomil	Tidak terditeksi	0,050	0,200

No	Komoditi	Yang diperiksa	Hasil	Batas Penetapan	BMR
27	Tomat	Metidation	0,125	0,035	0,100
		Diazinon	Tidak terditeksi	0,020	0,500
		Klorfirifos	Tidak terditeksi	0,059	1,000
28	Timun	Klorfirifos	Tidak terditeksi	0,059	-
		Diazinon	Tidak terditeksi	0,020	0,100
		Metomil	Tidak terditeksi	0,050	-
29	Terung Ungu utuh	Klorfirifos	Tidak terditeksi	0,059	1,000
		Metidation	Tidak terditeksi	0,035	-
		Metomil	Tidak terditeksi	0,050	-
30	Kacang Panjang	Metomil	Tidak terditeksi	0,050	0,200
		Diazinon	Tidak terditeksi	0,020	-
		Metidation	Tidak terditeksi	0,035	-
31	Buncis	Metomil	Tidak terditeksi	0,050	0,200
		Diazinon	Tidak terditeksi	0,020	-
		Metidation	Tidak terditeksi	0,035	-
32	Pare	Klorfirifos	Tidak terditeksi	0,059	-
		Diazinon	Tidak terditeksi	0,020	-
		Metidation	Tidak terditeksi	0,035	-
33	Kol	Klorfirifos	Tidak terditeksi	0,059	1,000
		Diazinon	Tidak terditeksi	0,020	0,500
		Metidation	Tidak terditeksi	0,035	0,100
34	Kangkung	Dimetoat	Tidak terditeksi	0,024	-
		Diazinon	Tidak terditeksi	0,020	-
		Metomil	Tidak terditeksi	0,050	-
35	Bayam	Metomil	Tidak terditeksi	0,050	-
		Diazinon	Tidak terditeksi	0,020	0,500
		Klorfirifos	Tidak terditeksi	0,059	-

Dari tabel uji residu pestisida terhadap 35 sampel terdeteksi yang mengandung pestisida adalah cabe, bawang tetapi masih berada dibawah Batas Minimal Residu (BMR) artinya masih tetap aman untuk dikonsumsi. Tomat, belum aman perlu dilakukan pencucian untuk mengurangi kadar residu.

Dari pemeriksaan terhadap 57 sampel yang terdiri dari residu pestisida 35 komoditi dan formalin 22 jenis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

No	Pemeriksaan Yang Dilakukan	Jumlah sampel diperiksa	Hasil Analisa Yang Tidak Aman	% sampel makanan yang aman dikonsumsi	Ket
1.	Residu pestisida	35	5 komoditi	85,7 %	sedang
2.	Formalin	22	4 komoditi	81,8 %	sedang
Tingkat Keamanan Pangan				83,75%	Sedang

Keterangan Level Tingkat Keamanan :

- 0 -60 % : Tidak Aman
- 61 – 75 % : Cukup
- 76 – 85 % : sedang
- 86 – 100 % : Tinggi

Jika diperhatikan perkembangan capaian Tingkat Keamanan Pangan ini dari tahun ke tahun dapat dijelaskan bahwa Tingkat Keamanan Pangan pada tahun 2012 tercapai 100% dari target level cukup, begitu juga dari tahun 2013- 2018 terealisasi 100% .Untuk lebih jelasnya Capaian Kinerja Tingkat Keamanan Pangan dari Tahun 2012-2018, dapat kita lihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Indikator Tingkat Keamanan Pangan
Tahun 2012-2018

No.	Indikator	Satuan	Realisasi						
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tingkat Keamanan Pangan	Level	Cukup	cukup	Cukup	sedang	sedang	sedang	sedang

Sumber : DKP, 2017

Sasaran kedua **Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman** masuk dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dengan tiga kegiatan yaitu, Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan, Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pangan Lokal Non Beras Non



Terigu, dan Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan. Output kegiatan yaitu terlaksananya Sekolah Lapang, penyaluran benih sayuran dan pupuk kandang, uji sampel pangan masyarakat yang beredar di masyarakat serta Lomba Pengolahan Pangan Lokal Non Beras Non Terigu.

Pada sasaran 2 ini termasuk kedalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 676.367.745,- dan realisasi sebesar Rp. 655.424.153,- atau 96,90%. Serapan anggaran sebesar 96,90% cukup tinggi yang berarti kinerja Dinas pada program ini dinilai baik.

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran ***Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman*** disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung : Didukung dengan program beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA), serta sosialisasi keamanan pangan. Masalah keamanan pangan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja, tetapi merupakan tugas bersama antara institusi dan stake holder dengan membentuk jejaring kerja (Networking) yang berjalan secara efektif dan efisien.

Faktor Penghambat

Terbatasnya SDM dalam penanganan keamanan pangan, masih rendahnya kesadaran masyarakat (produsen/petani/pedagang/konsumen) tentang keamanan pangan, kurangnya monitoring yang terintegrasi antara instansi yang berwenang, belum tersedianya laboratorium pengujian mutu dan keamanan pangan di Kota Payakumbuh.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran ***Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman***, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.13

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatkan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman	1.1	Skor PPH Konsumsi	%	80,5	84,1	104,47	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	551.715.745	534.769.553	96,93
		1.2	Tingkat Keamanan Pangan	Level	sedang	sedang	100	2.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	124.652.000	120.654.600	96,79
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR						10	TOTAL PER SASARAN		676.367.745	655.424.153
TINGKAT EFISIENSI 5,10%												
TINGKAT EFEKTIFITAS 105,26 %												

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran **Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman** berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Melakukan pelatihan atau bimtek untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas petugas pengawas.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawas keamanan pangan.
3. Koordinasi dan sinkronisasi dalam wadah jejaring keamanan pangan.
4. Menggiatkan sosialisasi dan promosi keamanan pangan secara berkesinambungan.

Sasaran 3
Meningkatnya kelancaran distribusi pangan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya kelancaran distribusi pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2017		%	Capaian Tahun 2018		%	Kategori	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2018 terhadap akhir renstra (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi				
1	Stabilitas Harga										
	* beras	%	10	3,18	168,2	10	1,75	182,5	Sangat baik	10	182,5
	* cabe	%	25	28,87	84,52	25	13,99	144,04	Sangat baik	25	144,04
	* bawang	%	10	11	90	10	16,04	39,6	Sangat kurang	10	39,6
2	Stabilitas Pasokan	%	77	77,55	99,28	77	78,25	98,38	Sangat baik	77	98,37
	Rata-rata Capaian Kinerja				110,5			116,13	Sangat baik		116,13

Sumber : Data diolah, DKP 2018

Sasaran meningkatnya kelancaran distribusi pangan dilihat dari indikator : Stabilitas Harga Beras, Stabilitas Harga Cabe, Stabilitas Harga Bawang, dan Stabilitas Pasokan dengan rata-rata capaian kinerja 116,13% kategori sangat baik

Capaian kinerja nyata indikator Stabilitas Harga Beras adalah sebesar 1,75 % dari target sebesar 10% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 182,5 % dengan kategori sangat baik. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya

Capaian kinerja nyata indikator Stabilitas Harga Cabe adalah sebesar 13,99 % dari target sebesar 25% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 144,04 % dengan kategori sangat baik. Capaian ini lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya yaitu naik 59,52 %.

Capaian kinerja nyata indikator Stabilitas Harga Bawang adalah sebesar 16,04 % dari target sebesar 10% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 39,6 % dengan kategori sangat kurang. Capaian ini menurun dari capaian tahun sebelumnya yaitu menurun 50,4 %.

Capaian kinerja nyata indikator Stabilitas Pasokan adalah sebesar 78,25% dari target sebesar 77% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 98,38 % dengan kategori sangat baik. Capaian ini turun sedikit dari capaian tahun sebelumnya yaitu menurun 0,91 %.

Sasaran meningkatnya kelancaran distribusi pangan dengan indikatornya ini menjadi sangat penting karena tertuang dalam SPM dan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan SPM Ketahanan Pangan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ Tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Daerah.

Agar produksi pangan dapat berkelanjutan, dan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi, pemerintah harus melindungi masyarakat dan petani dari gejolak harga, seperti harga jatuh pada saat panen raya, dan harga melambung pada saat di luar panen. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan kebijakan stabilisasi harga pangan agar petani sebagai produsen mendapatkan hasil yang menguntungkan, dan masyarakat sebagai konsumen mampu membeli bahan pangan dengan harga yang terjangkau.

Kebijakan stabilisasi harga pangan berperan dalam memantapkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan ketahanan/stabilitas politik nasional. Pengalaman Tahun 1996 dan Tahun 1998 membuktikan bahwa terjadinya goncangan ekonomi yang kemudian berubah menjadi krisis politik, terjadi karena harga pangan melonjak drastis dalam jangka waktu yang pendek. Untuk menghindari terulangnya kejadian tersebut, pemerintah berupaya merumuskan kebijakan stabilitas harga pangan yang komprehensif dan dapat merespon beberapa perubahan lingkungan strategis seperti dinamika ekonomi global dan perubahan sistem manajemen pemerintahan agar krisis ekonomi dan krisis politik tidak terulang kembali.

Koefisien Variasi (CV) merupakan suatu ukuran variasi yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang berbeda atau perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Dalam analisis harga koefisien variasi digunakan untuk mengetahui kestabilan harga. Dalam sistem distribusi dan harga pangan, bahwa harga bahan pangan pokok di tingkat konsumen dikatakan stabil bila nilai koefisien variasi (CV) nya berada dibawah 10%, apabila CV berada diatas 10% maka terjadi instabilitas atau harga bahan pokok yang bergejolak di suatu wilayah di tingkat konsumen.

D. Indikator Pertama Stabilitas Harga

- **Harga Beras**



Gambaran gejolak harga bahan pangan pokok (beras) di tingkat konsumen dari Bulan Januari s/d

Desember Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

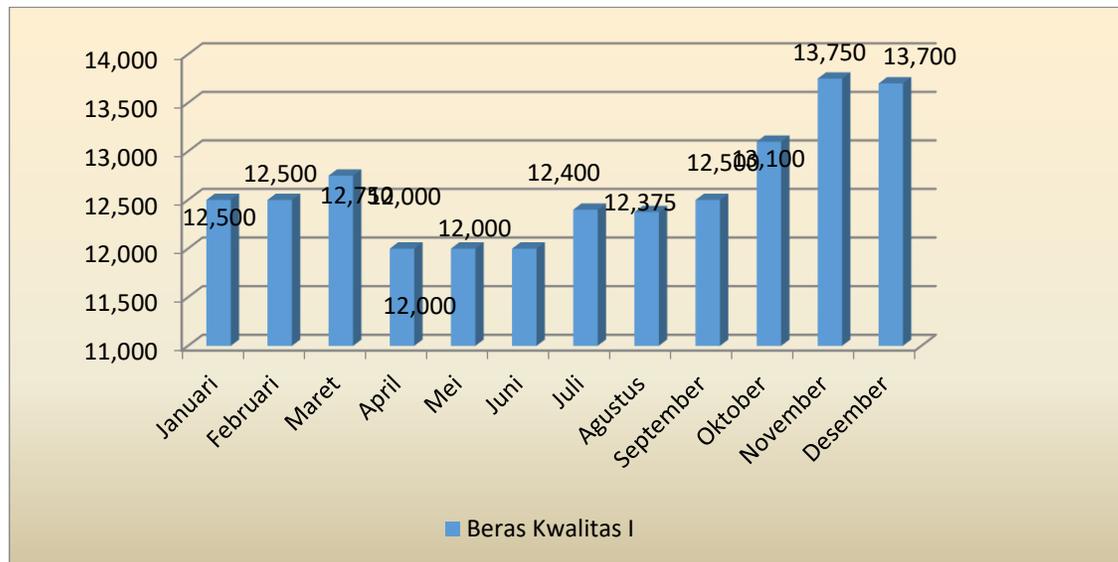
Tabel 3.15
Gambaran gejala Harga Bahan Pangan Pokok dan Coefisien Variasi (CV) Tingkat Konsumen
Tahun 2018

No.	Bulan	Harga Rata-rata Beras KW I di tingkat Konsumen	Harga Rata-rata Beras KW II di tingkat Konsumen
1	Januari	12.500	12.000
2	Februari	13.500	12.000
3	Maret	12.750	11.875
4	April	12.000	11.000
5	Mei	12.000	11.000
6	Juni	12.000	11.000
7	Juli	12.400	11.800
8	Agustus	12.375	11.500
9	September	12.500	12.000
10	Oktober	13.100	12.400
11	Nopember	13.750	13.125
12	Desember	13.700	13.000
Rata-rata		12.714	11.891
H-MAX		13.750	13.125
H-MIN		12.000	11.000
CV		1,63	1,88
CV Rata-rata		1,75	

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa indikator Koefisien Variasi Beras telah mencapai target yaitu $CV \leq 10\%$. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018 harga beras Kualitas I dan Kualitas II dalam kondisi stabil, yang ditunjukkan dengan nilai CV 1,75%.

Untuk melihat pergerakan harga beras baik kualitas I maupun kualitas II dapat kita lihat lebih jelas lagi melalui grafik dibawah ini :

Beras Kualitas I

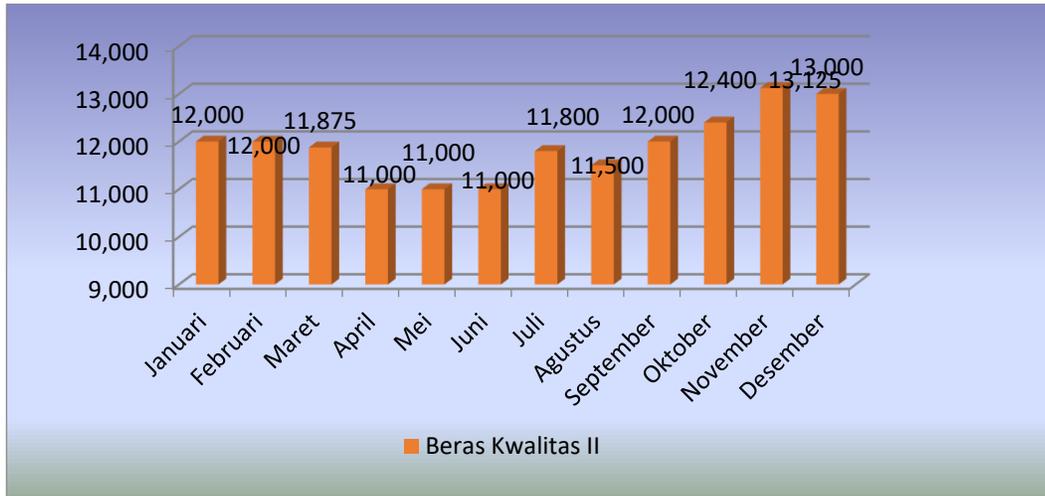


Gambar 3. Perkembangan Harga Beras Kualitas I di Tingkat Konsumen

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan harga beras kualitas I di tingkat konsumen berbanding lurus dengan perkembangan harga di tingkat produsen. Harga tertinggi beras kualitas I di tingkat konsumen terjadi pada bulan November s/d Desember dengan harga rata-rata Rp.13.725,-/kg. Padahal diawal tahun sampai pertengahan harga cukup stabil, dengan harga terendah terjadi pada bulan April s/d Juni pada rata-rata harga mencapai Rp.12.000,-/kg.

Beras Kualitas II

Disisi lain, perkembangan harga beras kualitas II di tingkat konsumen juga terlihat mengalami fluktuasi. Harga tertinggi beras kualitas II terjadi pada bulan November dan Desember dengan harga rata-rata Rp.13.062,-/kg. Pada bulan April s/d Juni dengan harga terendah pada harga rata-rata mencapai Rp.11.000,-/kg. Perkembangan harga beras kualitas II di tingkat konsumen dapat dilihat pada



Gambar 4. Perkembangan Harga Beras Kualitas II di Tingkat Konsumen

- **Harga Cabe**



Gambaran gejolak harga cabe di tingkat konsumen dari Bulan Januari s/d Desember Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

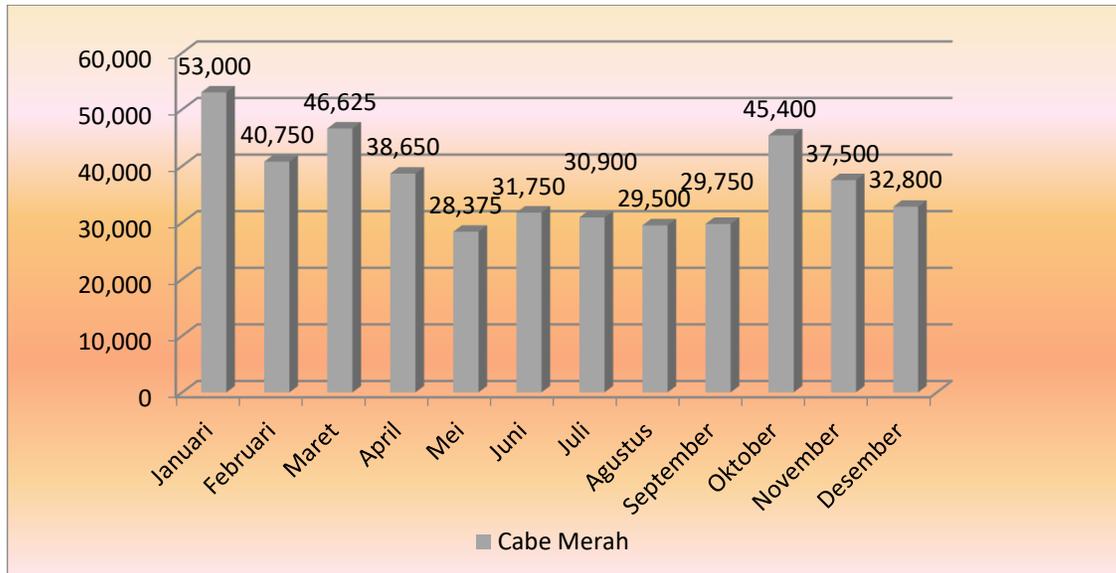
Tabel 3.16
Gambaran gejolak Harga Cabe Merah dan Coefisien Variasi (CV) Tingkat Konsumen
Tahun 2018

No.	Bulan	Harga Rata-rata Cabe Merah di tingkat Konsumen
1	Januari	53.000
2	Februari	40.750
3	Maret	46.625
4	April	38.650
5	Mei	28.375
6	Juni	31.750
7	Juli	30.900
8	Agustus	29.500
9	September	29.750
10	Oktober	45.400
11	Nopember	37.500
12	Desember	32.800
Rata-rata		37.083
H-MAX		53.000
H-MIN		28.375
CV		13,99

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa indikator Koefisien Variasi Cabe telah mencapai target yaitu $CV \leq 25\%$. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018 harga cabe dalam kondisi cukup stabil, yang ditunjukkan dengan nilai CV 13,99%.

Dari Tabel diatas dapat juga kita analisa bahwa gejolak harga juga terlihat dengan jelas. Pada bulan Januari, rata-rata harga cabe di tingkat konsumen berada pada angka Rp. 33.000,-/kg. Harga merosot turun pada bulan Februari sampai bulan Desember hingga mencapai Rp. 32.800,-/kg dan posisi harga terendah terjadi di bulan Mei yaitu Rp. 28.375,-/kg.

Perkembangan harga cabe merah di tingkat konsumen dapat dilihat pada Grafik 8.



Gambar 5. Perkembangan Harga Cabe Merah di Tingkat Konsumen

Tingginya harga cabe ini disebabkan oleh :

- a. Faktor cuaca, dimana di daerah produsen cabe baik di dalam daerah Sumatera Barat maupun di luar daerah Sumatera Barat seperti Jawa dan Lampung mengalami bencana banjir sehingga tanaman cabe banyak mengalami gagal panen.
- b. Berkurangnya luas tanam dan luas panen di daerah sentra cabe sehingga pasokan jadi berkurang.
- c. Meningkatnya biaya produksi.
- d. Cabe yang masuk dari daerah luar Sumatera Barat yang biasanya harganya di bawah cabe lokal, harganya juga tinggi sehingga semakin mendongkrak harga cabe lokal.

- **Harga Bawang Merah**



Gambaran gejala harga bawang merah di tingkat konsumen dari Bulan Januari s/d Desember Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17
Gambaran gejala Harga Bawang Merah dan Coefisien Variasi (CV) Tingkat Konsumen Tahun 2018

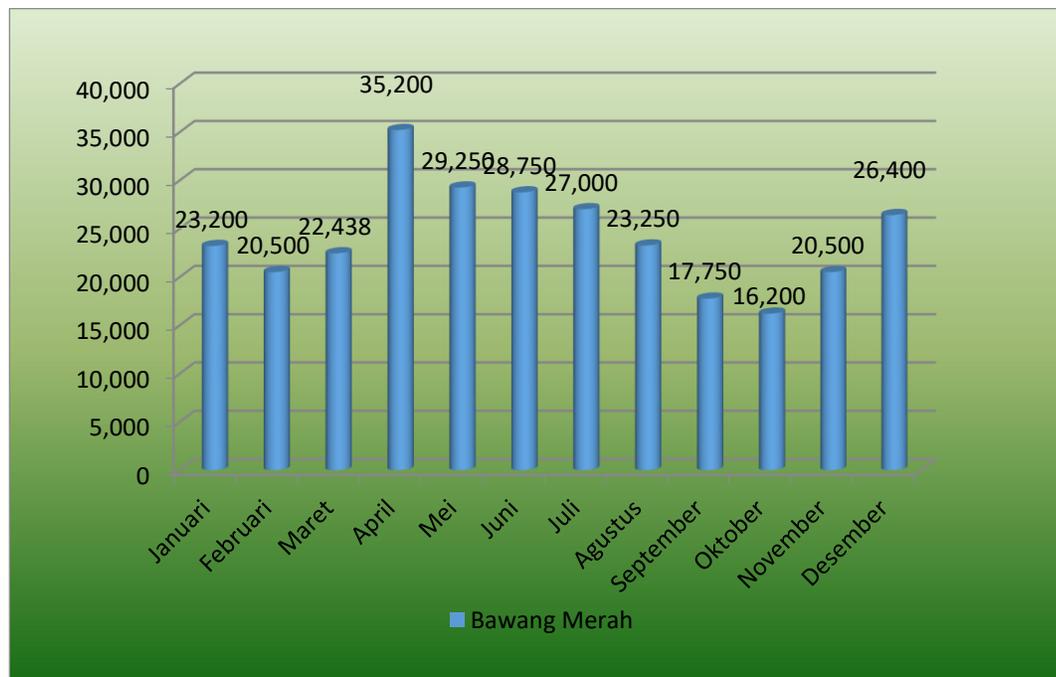
No.	Bulan	Harga Rata-rata Bawang Merah di tingkat Konsumen
1	Januari	23.200
2	Februari	20.500
3	Maret	22.438
4	April	35.200
5	Mei	29.250
6	Juni	28.750
7	Juli	27.000
8	Agustus	23.250
9	September	17.750
10	Oktober	16.200
11	Nopember	20.500
12	Desember	26.400
Rata-rata		24.203
H-MAX		35.200
H-MIN		16.200
CV		16,04

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa indikator Koefisien Variasi Bawang tidak mencapai target yaitu $CV \leq 10\%$. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018 harga bawang dalam kondisi tidak stabil, yang ditunjukkan dengan nilai CV 16,04 %.

Pada tahun 2018 ini, harga bawang merah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Ongkos produksi yang cukup tinggi menjadi penyebab pertama peningkatan harga bawang, selain itu juga karena daerah produsen bawang merah di Kabupaten Solok maupun di daerah Jawa yang merupakan sentra penghasil bawang merah, banyak mengalami gagal panen karena kondisi alam. Hal ini mengakibatkan pasokan ke Kota Payakumbuh menjadi berkurang.

Permintaan banyak, sementara persediaan terbatas mengakibatkan harga di tingkat konsumen melambung tinggi. Dimulai dari bulan Januari terjadi peningkatan harga hingga bulan April. Harga tertinggi terjadi pada bulan April, dengan harga rata-rata berada pada level Rp. 35.200,-/kg. Pada bulan Mei hingga Oktober terjadi penurunan dari harga Rp. 29.250,-/kg menjadi Rp. 16.200,-/kg.

Perkembangan harga bawang merah di tingkat konsumen dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Perkembangan Harga Bawang Merah di Tingkat Konsumen

E. Indikator Kedua Stabilitas Pasokan

Stabilitas pasokan dan harga pangan terutama pangan pokok merupakan kewajiban pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sulitnya memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan karena dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya kemampuan produksi pangan dalam negeri dan pengelolaan stok pangan nasional. Situasi ini diperparah dengan aksi spekulasi baik di daerah produsen yang surplus maupun daerah yang biasanya menjadi negara pengimpor beras.

Dalam rangka mewujudkan stabilitas pangan, tantangan ke depan adalah memperkuat kapasitas produksi pangan dari dalam negeri yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjangkau, serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan konsumen. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing produksi pangan akan lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk dalam negeri tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yang diminta, maka pasar dalam negeri akan diisi oleh produk sejenis yang berasal dari impor.

Dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5% - 40%. Untuk Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, mengambil patokan Pasokan Pangan dinyatakan stabil jika berada pada posisi stok 77 %.

Adapun data pasokan/penyediaan pangan yang tahun 2018 dapat digambarkan pada Tabel berikut :

Tabel 3.18

Data pasokan/Penyediaan Pangan di Kota Payakumbuh Tahun 2018

No.	Kelompok Bahan Pangan	Penyediaan Pangan (Ton) *)				
		Produksi	Perubahan Stok	Masuk	Keluar	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Padi-padian	44,241	0	15,887	9,183	50,945
2	Umbi-umbian/ Makanan Berpati	6,598	0	120	0	6,718
3	Gula	0	0	2,241	13	2,228
4	Buah Biji Berminyak	649	0	737	0	1,385
5	Buah-buahan	4,869	0	4,331	0	9,199
6	Sayuran	6,316	0	5,120	201	11,235
7	Daging	4,697	0	0	0	4,697
8	Telur	7,781	0	527	547	7,761
9	Susu	0	0	0	0	0
10	Ikan	488	0	5,984	2,574	3,898
11	Minyak/Lemak	5,147	0	8,204	0	13,351
	Jumlah	80,786	0	43,149	12,517	111,418

Sumber Data : Hasil Olahan DKP Kota Payakumbuh

Jumlah Penduduk : 131.819 jiwa

Keterangan : *) Angka Tetap 2017

Sasaran ketiga ***Meningkatnya kelancaran distribusi pangan*** masuk dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dengan tiga kegiatan yaitu, Kegiatan Koordinasi Pengawasan, Pembinaan dan Pemantauan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok dan Kegiatan Koordinasi

Pengkajian Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan. Output kegiatan yaitu Pemantauan Harga Pangan sebanyak 52 minggu, Pembinaan terhadap Kelompok LDPM dan rapat koordinasi.

Pada sasaran 3 ini termasuk kedalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 103.686.550,- dan realisasi sebesar Rp. 96.692.750,- atau 93,25%. Serapan anggaran sebesar 93,25% cukup tinggi yang berarti kinerja Dinas pada program ini dinilai baik.

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran ***Meningkatnya kelancaran distribusi pangan*** disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Koordinasi lintas sektor yang semakin baik.
2. Monitoring harga dan pasokan yang dilakukan secara kontiniu.

Faktor Penghambat

Masih ditemukan permasalahan dalam mengatasi gejolak harga cabe seperti ketersediaanya yang tidak mencukupi di saat konsumsi meningkat pada waktu-waktu tertentu. Sehingga harga melonjak naik. Di samping itu ada juga faktor cuaca, luas tanam, dan tingginya biaya produksi yang ikut membuat harga cabe menjadi tinggi.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran ***Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan***, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.19
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kelancaran Distribusi Pangan

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kelancaran Distribusi Pangan	1.1	Stabilitas Harga Beras	%	10	1,75	182,5	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/P erkebunan	103.686.550	99.692.750	93,25
		1.2	Stabilitas Harga Cabe	%	25	13,99	144,04					
		1.3	Stabilitas Harga Bawang	%	10	16,04	39,6					
		1.4	Stabilitas Pasokan	%	77	78,25	98					
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 4 INDIKATOR							121,25	TOTAL PER SASARAN	103.686.550	96.692.750
TINGKAT EFISIENSI 28,00 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 130,02 %												

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran **Meningkatkan Kelancaran Distribusi Pangan** berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Melakukan efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran sepanjang memungkinkan.
2. Melakukan percepatan realisasi kegiatan.
3. Melakukan monitoring harga dan pasokan secara kontiniu dan up date.

Sasaran 4
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.20
Analisis Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2017		%	Capaian Tahun 2018		%	Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2018 terhadap akhir renstra (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi			
1.	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektorat	Nilai	B	BB	100	BB	A	120	A	100
	Rata-rata Capaian Kinerja				100			120		100

Sumber : Data diolah, DKP 2018

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilihat dari indikator : Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektorat.

Capaian kinerja nyata indikator Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan oleh Inspektorat adalah sebesar A dari target BB yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 120 % dengan kategori sangat baik. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikatornya ini menjadi sangat penting karena penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai 81,28 dengan kategori A : memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Akan tetapi untuk penyempurnaan dokumen yang akan datang perlu dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Supaya di buat target tujuan pada Renstra
2. Supaya dilakukan reuiu secara berkala terhadap Renstra, dan dilaksanakan perbaikan sesuai hasil reuiu.
3. Supaya capaian target kinerja dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (reward) dan hukuman (punishment).
4. Suapaya dibuatkan laporan reuiu IKU.
5. Suapaya dimasa yang akan datang evaluasi atas Rencana Aksi dapat ditindak lanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata, sehingga pemantauan Rencana Aksi dapat memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan.
6. Seharusnya pencapaian target dijadikan dasar dalam pemberian reward untuk keberhasilan atau punishment untuk kegagalan.
7. Supaya Laporan Kinerja di upload ke dalam website.
8. Supaya Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh DPA Dinas Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.468.485.135 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.455.910.06 atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,57%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2018 Kinerja Dinas Ketahanan Pangan **Sangat Baik** dengan kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 64.991.656 hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Sasaran Renstra Dinas Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
Tahun 2018

No.	Sasaran	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan		84.678.320	81.535.524	96,29
		Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	7.754.100	7.027.350	
		Pengembangan Cadangan Pangan	38.008.480	37.763.974	

		Pengembangan Desa Mandiri Pangan	38.915.740	36.744.200	
2	Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman		676.367.745	655.424.153	96,90
		Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	479.146.755	466.665.303	
		Pengembangan dan Pembinaan Pangan Lokal Non Beras Non Terigu	72.568.990	68.104.250	
		Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	124.652.000	120.654.600	
3.	Meningkatnya Kelancaran Distribusi Pangan		103.686.550	96.692.750	93,25
		Koordinasi Pengawasan, Pembinaan dan Pemantauan LDPM	20.342.680	19.401.000	
		Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	4.861.070	4.656.900	

		Koordinasi pengkajian Peumusan Kebijakan Ketahanan Pangan	78.482.800	72.634.850	
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		603.752.520	569.841.052	94,38
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.520.000	2.496.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000	14.879.318	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.090.450	3.980.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3.212.400	2.653.900	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	216.066.000	210.369.464	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.498.224	1.403.124	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	12.392.300	11.381.475	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.265.032	9.070.800	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.756.500	1.756.500	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.102.000	28.285.000	

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.560.000	10.320.000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	10.037.500	6.778.200	
		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	144.583.000	142.221.041	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	77.645.500	68.669.030	
		Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	40.000.000	38.424.000	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	3.561.348	2.725.000	
		Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	2.632.266	1.798.200	
	Jumlah		1.468.485.135	1.403.493.479	95,57

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh pada Tahun 2018.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.22

**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
Tahun 2018**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Sasaran 1,	1		81.535.524	96,29
1	Melebihi/Melampaui Target	1	101,57%		
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
B.	Sasaran 2,	2		655.424.153	96,90
1	Melebihi/Melampaui Target	1	104,47		
2	Sesuai Target	1	100%		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
B.	Sasaran 3,	2		143.880.112	98,07
1	Melebihi/Melampaui Target	1	122,04%		
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	1	98,37%		

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

D. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1.	Juara I Tingkat Provinsi Sumatera Barat,	Lomba Pemanfaatan Lahan Pekarangan	2018



No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
2.	Juara Harapan II Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Lomba Pengolahan Pangan Lokal Non Beras Non Terigu.	2018



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2018 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2018. Pembuatan LkjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LkjIP Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101,57 % atau interpretasi sangat baik

Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 102 % atau interpretasi sangat baik

Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 121,25 % atau interpretasi sangat baik

Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 % atau interpretasi sangat baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 (empat) sasaran tersebut, secara umum telah melebihi/sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh TA 2018 sebesar Rp. 1.468.485.135,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.403.493.479,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,57% dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 64.991.656,-

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.468.485.135,- telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan adalah 95,57 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Payakumbuh.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh

Payakumbuh, Februari 2019

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH**



EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

